RENCANA KERJA (RENJA)
DPMPD TAHUN 2025



PEMERINTAHAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2024

BAB V

PENUTUP

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan secara bertahap, sehingga pada dasarnya pembangunan dari suatu tahap merupakan kelanjutan peningkatan dan penyempurnaan dari pembangunan tahap selanjutnya.

Dalam upaya mendorong keberhasilan pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri maka pembangunan desa lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dibiayai dari APBD II, APBD I maupun APBN, didukung juga dari dana swadaya masyarakat dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pada khususnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diharapkan dapat berjalan denan lancer, efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025, maka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja PD Tahun 2025 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat dengan demikian akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya RKPD 2025 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.

Kediri, - - 2024

KEPALA DPMPD
KABUPATEN KEDIRI

AGUS CAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 197009130 199201 1 001

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);

33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri . Sistematika Rancangan Renja Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I. **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja DPMPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DPMPD Tahun 2025

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPD Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan DPMPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan , penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan

BAB III. **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsional DPMPD

3.2 **Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPMPD

3.3 **Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusuan program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB. V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPD Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024 sehingga teridentifikasi sampai sejauh mana mana DPMPD melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk pelaksanaan Renja Tahun 2023 pada umumnya realisasi program dan kegiatan telah tercapai sesuai target kinerja yang telah direalisasikan.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2024 diperkirakan bahwa program dan kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut:

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan.

Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri diuraikan, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat	1. Jumlah BUMDes yang terbentuk/aktif	295 Desa	252 Desa	85 %	5
2	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Jumlah desa mandiri	12	50	416 %	1
		2 Jumlah desa maju	150	240	160 %	2
3	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	1. Prosentase lembaga desa aktif	84 %	83 %	98,8 %	4
4	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu	86 %	86 %	100 %	3

Dari uraian tabel diatas untuk Tahun Anggaran 2023 mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut, ada 1 (satu) indikator kinerja yang berhasil dicapai 100 % yaitu :

- **Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu**

bahkan 2 (dua) indikator dapat melebihi target yaitu :

- **Jumlah desa mandiri ;**
- **Jumlah maju ;**

Sedangkan ada 2 (dua) indikator yang capaiannya tidak memenuhi target yaitu :

- **Prosentase Lembaga desa aktif** dan
- **Jumlah BUMDes yang aktif.**

Terhadap berbagai target capaian yang melebihi maupun tidak tercapai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan penanganan di masa mendatang.

A. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indicator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.2.2.1. Sasaran Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa dengan indikator sasaran :

1.2.2.1.2 Jumlah BUMDes yang aktif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa	Jumlah BUMDesa yang aktif	280	295	286 (102%)	252 (85%)

Dari tabel diatas dapat diketahui menunjukkan bahwa capain kinerja DPMPD selama 2023 dengan Sasaran Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa dengan indikator Jumlah BUMDes yang aktif . Dari taget 295 desa hanya bisa realisasi sebesar 252 desa atau 85 % capaian realisasi kinerjanya. Hal ini disebabkan antara lain :

- terjadinya pasang surut kegiatan yang menjadi usaha BUMDes ;
- Kurangnya partisipasi masyarakat baik menjadi pelanggan, pengurus maupun mitra ;
- Kurangnya SDM yang kompeten dan profesional dalam mengelola BUMDes ;
- Kurangnya penggalian potensi ekonomi yang ada di di desa sehingga menyebabkan stagnan kegiatan usaha BUMDes ;
- Kestabilan politik desa.

Sedangkan tahun 2022 sasaran dari target 280 desa terealisasi sebesar 286 desa atau tercapai sebesar 102 % dari yang ditargetkan.

Sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan Program Administrasi Pemerintahan Desa, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatannya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.

Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi (%)		Ket.
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa	Jumlah BUMDesa yang aktif	103	85	Turun

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.

BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputuan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Di Kabupaten Kediri dari 343 desa sejak 2016 semuanya sudah membentuk BUMdes sedangkan yang sudah aktif sampai dengan tahun 2023 sebanyak 252 BUMdes dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 dimana terdapat 286 BUMDes yang aktif. Dan tahun 2023 seiring perjalanan waktu dimungkinkan setiap BUMDes mengalami pasang surut dalam menjalankan usahanya maka dari itu dilakukan pemutakhiran data terkait BUMDes yang aktif di Kabupaten Kediri agar dapat diperoleh data yang lebih valid lagi.

Sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan Program Administrasi Pemerintahan Desa, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatannya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.

1.2.2.1 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1.2.2.2.1 Jumlah Desa Mandiri dan Jumlah Desa Maju

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Jumlah desa mandiri	8	12	31 (387%)	50 (416%)
		2. Jumlah desa maju	130	150	187 (143%)	240 (160%)

Dari tabel diatas dapat diketahui menunjukkan bahwa capain kinerja DPMPD selama 2023 dengan Sasaran Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan indikator Jumlah Desa Mandiri dan Jumlah Desa Maju.

- Jumlah desa mandiri dengan target 12 desa bisa tercapai sebanyak 50 desa atau tercapai 416 %.
- Jumlah desa maju dengan target 150 desa bisa tercapai sebanyak 240 desa atau tercapai 160 %.

Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi (%)		Ket.
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah desa mandiri	387	416	Naik
		Jumlah desa maju	143	160	Naik

Sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Untuk menentukan sebuah desa itu tergolong kategori berkembang, maju, mandiri dan tertinggal ada tolak ukur tersendiri yang di nilai dengan angka-angka atau variable. Ini lah yang di maksud dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

Nah sebagaimana juga terlampir dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), disitu juga dijelaskan maksud dari kategori desa tertinggal, desa berkembang, maju dan mandiri.

Jadi disini kita akan sedikit belajar memahami lebih jauh tentang arti dan maksud dari status kategori – kategori desa tersebut.

Untuk lebih jelasnya kita kutipkan disini pengertian dari kategori desa tersebut seperti penjelasan dibawah ini :

1. ***Kategori Desa Mandiri***

   Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

2. ***Kategori Desa Maju***

   Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

3. ***Kategori Desa Berkembang***

   Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki

potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4. ***Kategori Desa Tertinggal***

   Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

5. ***Kategori Desa Sangat Tertinggal***

   Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Dari penjelasan di atas sedikit banyak sudah bisa di fahami apa itu kategori desa Mandiri, Desa maju, berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Sehingga secara umum kita sudah bisa menggambarkan kategori desa kita masing-masing.

Namun untuk penentuan secara rinci mengenai kategori desa perlu dilakukan penilaian-penilaian terhadap indikator IDM sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2016.

Yaitu dengan cara mengisi formulir Kuisioner perkembangan IDM yang biasanya dilakukan oleh pendamping Lokal Desa.

1.2.2.2. Sasaran Meningkatnya kapasitas lembaga desa dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1.2.2.3.1. Prosentase Lembaga desa aktif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan desa aktif	81 %	84 %	*84 % (103%)*	83 % (98,8%)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capain kinerja DPMPD selama 2023 dengan Sasaran Meningkatnya kapasitas lembaga desa dengan indikator Prosentase Lembaga desa aktif dari target 84 % dan realisasi sebesar 83 % atau 98,8% capaianya kinerjanya.

Tabel Anggota PKK Aktif Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANGGOTA TP PKK							
		JUMLAH ANGGOTA TP PKK	YANG AKTIF	TIDAK AKTIF	% AKTIF	PKK DSN/LINGK	PKK RW	PKK RT	DASA WISMA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	PARE	1513	1010	503	67%	43	158	442	337
2	KANDANGAN	**406**	**376**	**30**	**93%**	**44**	**118**	**258**	**651**
3	KEPUNG	676	669	7	99%	24	12	94	17
4	PUNCU	237	237	0	100%	36	78	332	125
5	PLOSOKLATEN	1071	1071	0	100%	28	76	310	406
6	BADAS	905	462	443	51%	115	196	566	668
7	GURAH	958	915	43	96%	58	127	484	877
8	TAROKAN	299	289	10	97%	160	136	335	36
9	GROGOL	365	329	36	90%	35	162	290	400
10	BANYAKAN	552	456	96	83%	142	59	131	57
11	SEMEN	273	253	20	93%	30	77	227	29
12	MOJO	962	850	112	93%	60	148	448	1012
13	NGASEM	304	285	18	94%	13	53	240	153
14	GAMPENGREJO	532	415	87	78%	20	75	148	107
15	NGADILUWIH	1211	1000	211	83%	104	97	278	58
16	WATES	984	939	45	95%	107	179	617	1239
17	KANDAT	562	540	22	96%	145	409	106	667
18	NGANCAR	319	290	29	91%	39	215	148	218
19	RINGINREJO	308	306	2	99%	54	511	157	1170
20	KRAS	690	600	90	87%	92	96	290	130
21	PAPAR	1546	1346	200	87%	220	152	562	1022
22	PLEMAHAN	612	510	102	83%	60	116	404	807
23	PURWOASRI	1721	957	754	56%	184	106	238	777
24	KUNJANG	386	345	41	93%	51	145	302	699
25	PAGU	627	497	93	93%	91	62	231	515
26	KAYENKIDUL	467	428	71	92%	46	109	322	2044
JUMLAH		**18486**	**15375**	**3065**	**83%**	**2001**	**3672**	**7960**	**14221**

Tabel PKK Aktif Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANGGOTA TP PKK							
		JUMLAH ANGGOTA TP PKK	YANG AKTIF	TIDAK AKTIF	% AKTIF	PKK DSN / LINGK	PKK RW	PKK RT	DASA WISMA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	PARE	616	530	86	86%	42	125	397	612
2	KANDANGAN	365	337	28	92%	44	134	321	802
3	KEPUNG	662	582	80	88%	160	16	95	113
4	PUNCU	205	205	0	100%	36	79	314	272
5	PLOSOKLATEN	936	742	194	79%	37	95	324	253
6	BADAS	802	432	370	54%	226	218	548	411
7	GURAH	1012	966	46	95%	79	208	403	1096
8	TAROKAN	294	277	17	94%	0	0	0	0
9	GROGOL	474	370	104	78%	35	162	300	400
10	BANYAKAN	531	435	96	82%	142	59	131	57
11	SEMEN	278	270	8	97%	50	83	242	989
12	MOJO	962	962	0	100%	58	148	448	939
13	NGASEM	298	270	28	91%	23	80	399	274
14	GAMPENGREJO	502	415	87	83%	12	43	79	107
15	NGADILUWIH	1323	1112	211	84%	189	97	278	325
16	WATES	792	765	27	97%	65	248	563	970
17	KANDAT	562	540	22	96%	145	409	106	667
18	NGANCAR	319	290	29	91%	39	148	215	218
19	RINGINREJO	308	308	0	100%	54	162	511	1170
20	KRAS	545	478	67	88%	65	84	162	162
21	PAPAR	1133	845	288	75%	92	78	269	514
22	PLEMAHAN	444	414	30	93%	64	116	413	432
23	PURWOASRI	1721	967	754	56%	184	238	433	777
24	KUNJANG	386	345	41	89%	51	145	302	699
25	PAGU	965	908	57	94%	97	79	258	601
26	KAYENKIDUL	290	286	4	99%	53	127	287	606
JUMLAH		**16725**	**14051**	**2674**	**84%**	**2042**	**3381**	**7798**	**13466**

Sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatannya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi (%)		Ket.
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	103	98,8	Turun

1.2.2.3. Sasaran Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1.2.2.4.1 Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu	83%	86%	83%	86 %

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capain kinerja DPMPD selama 2023 dengan Sasaran Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa dengan indikator Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu dari target 83 % dan realisasi sebesar 86 % atau 100 % capaianya kinerjanya.

Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi (%)		Ket.
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	

Prosentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan dari target 86 % data sampai awal Januari 2023 bisa terealisasi sesuai target yaitu 86 % hal ini disebabkan karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70 ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sasaran tersebut diatas dicapai dengan dapat dicapai dengan Program Administrasi Pemerintahan Desa, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatannya adalah :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa ;
- Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa ;

B.1 Capaian Kinerja RPJMD

Sesuai dengam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, bahwa Program dan kegiatan yang pada Rencana Kerja Tahun 2023 telah disesuaikan dengan peraturan tersebut yang meliputi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Capain kinerja RPJMD di tahun 2023 yang sesuai dengan RPJMD kabupaten Kediri yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berkuti :

Tabel
Capaian Kinerja Tahun 2023 *dibandingkan dengan RPJMD*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	*47*	*84*	*179*	

Tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran dalam RPJMD kabupaten Kediri 2021 – 2026 adalah ‘Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa” dengan indikator kinerja Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM.

Tabel
Perbandingan Capaian Tahun 2023

No.	Keterangan	Prosentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM
1	Kabupaten Kediri	84,54 %
2	Provinsi Jawa Timur	83,84 %
3	Nasional	45,82 %

Sumber Data : Keputusan Menteri Desa dan PDTT No. 174 Tahun 2023

Dari Tabel diatas didapat bahwa capaian Prosentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM di Kabupaten Kediri berada diatas capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023, dapat diperoleh data sebagai berikut :

1. Jumlah desa di Indonesia sebanyak 75.265 Desa dengan perincian sebagai berikut :
   - Desa Mandiri : 11.456 Desa
   - Desa Maju : 23.035 Desa
   - Desa Berkembang : 28.766 Desa
   - Desa Tertinggal : 7.154 Desa
   - Desa Sangat Tertinggal : 4.850 Desa
   - Desa tidak memenuhi kriteria : 4 Desa

2. Rekaputulasi di Provinsi Jawa Timur
   - Desa Mandiri : 2.800 Desa
   - Desa Maju : 3.674 Desa
   - Desa Berkembang : 1.247 Desa
3. Rekaputulasi di Kabupaten Kediri
   - Desa Mandiri : 50 Desa
   - Desa Maju : 240 Desa
   - Desa Berkembang : 53 Desa

Dukungan anggaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Sebelum Perubahan APBD terdiri dari 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan total anggaran Rp. 13.347.683.871,-. Dalam Perubahan Perbup ke I DPMPD mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 64.000.000,- yang bersumber dari Bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Timur untuk sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Perubahan Perbup ke II mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 535.302.000 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Rokok untuk kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa Rp. 100.000.000,- dan sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp. 435.302.000 sedangkan pada Perubahan Perbup ke IV DPMPD Kabupaten Kediri mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 2.358.150.000 yang bersumber dari BK APBD Provinsi Jawa Timur untuk sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Pada Perubahan APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 disamping adanya pergeseran anggaran antar sub kegiatan juga ada penambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal untuk sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dan total plafon PAPBD menjadi Rp. 15.567.339.000,-

Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2023, realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dari total plafon sebesar Rp. 15.567.339.000,- teralisasi sebesar Rp. 14.846.737.843 atau sebesar 95,37 % sedangkan realisasi kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI
DPMPD TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PROGRAM	TOTAL			Sisa Anggaran	%
		Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	**15.567.339.000**	**14.846.737.843**	**95,37**	**720.601.157**	4,63
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.651.528.900**	**5.330.807.407**	94,33	**320.721.493**	5,67
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.242.500	1.234.900	99,39	**7.600**	0,61
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	740.500	735.900	99,38	4.600	0,62
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	502.000	499.000	99,40	3.000	0,60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.870.251.949	4.576.465.632	93,97	**293.786.317**	6,03
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.286.480.449	3.996.664.062	93,24	289.816.387	6,76
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	412.423.500	411.815.170	99,85	608.330	0,15
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	169.320.000	166.020.000	98,05	3.300.000	1,95
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	826.000	821.500	99,46	4.500	0,54
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	802.000	746.900	93,13	55.100	6,87
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	400.000	398.000	99,50	2.000	0,50
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.241.000	4.738.700	75,93	**1.502.300**	24,07
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.241.000	4.738.700	75,93	1.502.300	24,07
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.685.100	408.468.466	97,10	**12.216.634**	2,90
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.687.500	1.684.800	99,84	2.700	0,16
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.318.200	181.075.000	97,19	5.243.200	2,81
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.909.500	3.870.143	98,99	39.357	1,01
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.864.800	1.794.000	96,20	70.800	3,80
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.609.100	3.586.000	99,36	23.100	0,64

15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.296.000	176.464.923	96,27	6.831.077	3,73
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000	39.993.600	99,98	6.400	0,02
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.485.120	182.988.800	94,58	**10.496.320**	5,42
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	1.100.000	100,00	0	0,00
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.080.000	8.631.667	77,90	2.448.333	22,10
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.765.000	79.576.570	95,00	4.188.430	5,00
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.540.120	93.680.563	96,04	3.859.557	3,96

1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.623.231	156.910.909	98,30	**2.712.322**	1,70
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	47.492.909	94,99	2.507.091	5,01
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.623.231	109.418.000	99,81	205.231	0,19
II	**PROGRAM PENATAAN DESA**	10.924.000	10.499.500	96,11	**424.500**	3,89
	Penyelenggaraan Penataan Desa	10.924.000	10.499.500	96,11	**424.500**	3,89
23	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	10.924.000	10.499.500	96,11	424.500	3,89
III	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	22.110.000	21.059.000	95,25	**1.051.000**	4,75
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	22.110.000	21.059.000	95,25	**1.051.000**	4,75
24	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	22.110.000	21.059.000	95,25	1.051.000	4,75
IV	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	7.801.866.100	7.480.004.174	95,87	**321.861.926**	4,13
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.801.866.100	7.480.004.174	95,87	**321.861.926**	4,13
25	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	273.478.000	262.483.369	95,98	10.994.631	4,02
26	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	40.919.600	38.560.000	94,23	2.359.600	5,77
27	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	54.172.000	52.020.000	96,03	2.152.000	3,97
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.104.053.600	4.045.901.698	98,58	58.151.902	1,42

29	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.500.894.000	2.268.840.000	90,72	232.054.000	9,28
30	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	12.680.000	11.780.000	92,90	900.000	7,10
31	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	7.980.000	7.730.000	96,87	250.000	3,13
32	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	132.083.100	123.645.900	93,61	8.437.200	6,39
33	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	117.853.500	116.670.000	99,00	1.183.500	1,00
34	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	23.713.600	22.190.000	93,57	1.523.600	6,43
35	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	62.425.000	61.985.000	99,30	440.000	0,70
36	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	57.599.600	56.530.000	98,14	1.069.600	1,86
37	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	56.348.000	55.518.000	98,53	830.000	1,47
38	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	202.859.200	202.584.207	99,86	274.993	0,14
39	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	154.806.900	153.566.000	99,20	1.240.900	0,80
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	2.080.910.000	2.004.367.762	96,32	**76.542.238**	3,68
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.080.910.000	2.004.367.762	96,32	**76.542.238**	3,68
40	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	190.259.100	187.578.100	98,59	2.681.000	1,41
41	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	294.125.000	229.526.640	78,04	64.598.360	21,96
42	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	228.105.000	227.464.120	99,72	640.880	0,28
43	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15.575.000	15.315.025	98,33	259.975	1,67

44	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	114.974.700	114.822.460	99,87	152.240	0,13
45	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.237.871.200	1.229.661.417	99,34	8.209.783	0,66

C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kediri dalam mencapai target kierja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel

Analisis Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat	Jumlah BUMDes yang aktif	102	97,61	4,39	85	95,87	-10,87
2	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Jumlah Desa Mandiri	387	81,68	305,32	416	95,88	320,12
		2. Jumlah Desa Maju	143	81,68	61,32	143	95,88	47,12
3	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	Prosentase lembaga desa aktif	103	81,68	21,32	98,8	96,32	2,48
4	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	Prosentase laporan keuangan yang tepat waktu	100	97,61	2,39	100	95,87	4,13

3.2. Permasalahan dan Solusi

3.2.1. Permasalahan

1. Belum maksimalnya kinerja BUM Desa dan fungsi pasar desa di perdesaan;
2. Belum maksimalnya kapabilitas aparatur pemerintah desa dan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa ;
3. Belum maksimalnya SDM aparatur pemerintah desa ;
4. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi desa serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

4.2.2. Solusi

1. Meningkatkan kinerja Lembaga Ekonomi Perdesaan secara optimal, melalui Pengembangan BUMDesa, BUMDesa Bersama, dan Pasar Desa berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan peran serta/ partisipasi masyarakat di dalam kelembagaan masyarakat (LPMD/K) dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, melalui:
   a. Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan desa;
   b. Peningkatan Peran dan Fungsi Pendamping Desa melalui Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ KPMD;
   c. Optimalisasi Peran PKK dan Posyandu dalam pembangunan desa.
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa melalui:
   a. Pengembangan Sistem Administrasi Pembangunan Desa;
   b. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
   c. Pengembangan Data dan Informasi Desa; dan
   d. Pengembangan Pola/ Sistem Pembinaan Desa, pengukuran perkembangan desa, dan evaluasi perkembangan desa.
4. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Perdesaan, melalui:

a. Optimalisasi Kinerja Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kediri

b. Pengembangan TTG, Pembinaan Posyantek,

c. Lomba TTG Tingkat Kabupaten untuk masyarakat umum di wilayah Kabupaten Kediri

d. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam rangka mengembangkan pusat pertumbuhan baru berupa spot/ titik pengembangan produk usaha masyarakat, memperluas jaringan permodalan, pembinaan SDM, dan pengembangan jaringan pemasaran.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan salah satu Badan yang tugas dan fungsinya membidangi pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan peleburan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Pemerintahan Desa.

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disahkan pada tanggal 15 September 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

II.2.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten, bahwa Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

II.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

   Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- penyusunan perencanaan program dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pembinaan UPTD; dan

  pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

II.2.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaaan masyarakat dan pemerintahan desa.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan dinas;
- pengoordinasian penyusunan program dan perencanaan dinas;
- pengelolaan administrasi, pelaporan, sistem informasi, pemantauan dan evaluasi dinas;
- pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
- melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian;
- memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas ;
   - melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
   - menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
   - menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
   - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bina pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan serta keuangan dan aset desa;

- pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan serta keuangan dan aset desa;
- pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan serta keuangan dan aset desa;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan serta keuangan dan aset desa ; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat , promosi dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- pelaksanaan pembinaan teknis pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat, promosi dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- pelaksanaan teknis pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat, promosi dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat, promosi dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

e. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa

Mempunyai tugas tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penataan dan kerjasama desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis sumber daya alam dan teknologi tepat guna,kerja sama desa, administrasi dan penataan desa;
- pelaksanaan pembinaan teknis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, kerja sama desa, administrasi dan penataan desa;
- pelaksanaan koordinasi teknis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, kerja sama desa, administrasi dan penataan desa;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, kerja sama desa, administrasi dan penataan desa; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

f. Bidang Kemasyarakatan Desa

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kemasyaraktan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kemasyaraktan desa mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat;
- pelaksanaan pembinaan teknis lembaga kemsyarakatan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan sosial budaya masyarakat;
- pelaksanaan koordinasi teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan sosial budaya masyarakat;

- pelaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan sosial budaya masyarakat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kediri sebagaimana terlampir.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu :

Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari dalam merupakan Faktor Internal yaitu :

1. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri belum memadai.
2. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Kediri menyediakan anggaran dalam mendukung program-program yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri
3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri dalam mendukung keseluruhan program dibidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingat

bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata berada pada pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

4. Koordinasi pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai instansi terkait dalam kegiatan berdimensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri masih lemah, terlihat masih tumpang tindih program.
5. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai dibidang–bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, minimnya penguasaan teknologi juga menjadi satu keterbatasan,mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektifitas serta efisiensi kerja.

6. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian dan/atau pemeliharaan.

Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari luar merupakan Faktor Eksternal yaitu :

1. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dimana :
    - Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa relative masih rendah kemampuan dan ketrampilan pengurus lembaga kemasyarakatan belum merata pada seluruh anggota pengurus.
    - Rendahnya motivasi masyarakat untuk diperankan sebagai lembaga kemasyarakatan

- Keberadaan lembaga perekonomian desa belum berfungsi secara maksimal
- Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) perangkat desa
- Masih kurangnya aparatur desa yang ahli/kompeten dibidangnya

2. Basis data yang valid guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga cukup sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. RKPD merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RKPD tersusun melalui beberapa mekanisme perencanaan yaitu melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan,Kabupaten/Kota termasuk Forum Perangkat Daerah (Forum PD).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi,perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan usulan dari kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)

Kabupaten Kediri ke dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri.

Dari hasil Forum PD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap PD. Dalam keadaan terdapat usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap PD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan RENJA PD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap PD.

Musrenbang tahunan atau Musrenbang RKPD dan Forum PD berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

B A B III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2019-2024 dan RKP Nasional. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Kediri yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

III.2 Tujuan

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Saran DPMPD yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri adalah "**Meningkatnya kemandirian Masyarakat dan desa "** dengan Indikator Tujuan :

1. Persentase Desa Mandiri
2. Persentase Desa Maju

III.3 Sasaran

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan maka DPMPD Kabupaten Kediri menjabarkan dalam suatu sasaran, yang mencakup :

1. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat ;
2. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga desa ;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.

III.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah merupakan penjabaran dari rencana kegiatan masing-masing PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebagai berikut :

III.3.1 Program dan Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. **Kegiatan Perencanaan,penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :**
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;
   - Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :**
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD
   - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosisi Realisasi Anggaran
3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :**
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ;
4. ***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :***

- *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor ;*
- *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;*
- *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
- *Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;*
- *Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan*
- *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*
- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- *Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD*

5. ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :***
   - *Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;*
   - *Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan listrik;*
   - *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor*
   - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*
6. ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :***
   - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan ;*
   - *Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya;*

B. Program Penataan Desa

Kabupaten/Kota

1. **Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :**

   Fasilitasi Tata Wilayah Desa

C. Program Peningkatan Kerjasama desa

1. **Kegiatan Fasilitasi kerjasama Antar Desa yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :**
   - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

D. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. **Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :**
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa ;
   - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
   - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
   - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
   - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
   - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa
   - Penyelenggaraan Pemilihan,pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
   - Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
   - Fasilitasi penyusunan profil desa
   - Fasilitasi pengelolaan aset desa

- Fasilitasi Peningkatan kapasitas anggota BPD
- Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta lomba Desa dan Kelurahan

E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan mayarakat adat

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota yang dalam pelaksanaannya mencakup Sub kegiatan berikut :

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Bupati Kediri Periode 2021 – 2026 pada Misi ke 9 yaitu "**Perwujudan Kemandirian Desa untuk kesejahteraan Masyarakat".**

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan program yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program priortas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program - program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan

indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel rumusan rencana Program dan Kegiatan DPMPD Kabupaten Kediri pada Rencana Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dalam lampiran.

Tabel : RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KEDIRITAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA						**11.785.516.570,00**							**17.456.334.687,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.785.516.570,00**							**17.456.334.687,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**11.785.516.570,00**							**17.456.334.687,00**	
1,	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan administrasi perkantoran***	**-**			**12 Dokumen**	**5.160.276.270,00**						-	**9.299.702.487,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah*	-			12 Dokumen	6.445.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri	-	6.445.000,00	DPMPD

	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	5.635.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		5.635.000,00	DPMPD
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	810.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		810.000,00	DPMPD
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan*	-			12 Laporan	4.451.101.770,00			-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri	-	8.309.605.687,00	DPMPD

	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/bulan	4.207.858.570,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		8.066.362.487,00	DPMPD
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	74.610.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		74.610.000,00	DPMPD
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	165.720.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		165.720.000,00	DPMPD

	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	902.400,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		902.400,00	DPMPD
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1.144.400,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		1.144.400,00	DPMPD
	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	866.400,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		866.400,00	DPMPD

	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 paket	0,00			-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEM BANGUNA N SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri	-	4.200.000,00	DPMPD
	2.13.01.2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEM BANGUNA N SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		4.200.000,00	DPMPD
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum*	-			1 paket	478.913.700,00			-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEM BANGUNA N SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri	-	638.036.000,00	DPMPD

	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.606.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		1.606.000,00	DPMPD
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	85.167.400,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		85.167.400,00	DPMPD
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.663.700,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		9.103.900,00	DPMPD

	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	788.600,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNA N SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		788.600,00	DPMPD
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.637.800,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNA N SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		1.637.800,00	DPMPD
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNA N SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		3.600.000,00	DPMPD

	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39 Laporan	327.850.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		482.532.300,00	DPMPD
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	53.600.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		53.600.000,00	DPMPD
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 paket	131.615.800,00			-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri	-	199.215.800,00	DPMPD

	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.100.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		1.100.000,00	DPMPD
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		12.000.000,00	DPMPD
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	32.700.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		44.800.000,00	DPMPD

	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	85.815.800,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		141.315.800,00	DPMPD
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 paket	92.200.000,00			-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri	-	142.200.000,00	DPMPD
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 Unit	42.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		42.000.000,00	DPMPD

	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.200.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEM BANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPMPD Kab. Kediri		100.200.000,00	DPMPD
2,	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**24.055.800,00**						**-**	**24.055.800,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	24.055.800,00			-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP8 : REFORMASI BIROKRASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	-	-	24.055.800,00	DPMPD
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa													

			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				40 Desa	24.055.800,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP8 : REF ORMASI BI ROKRASI DALAM PE NINGKATA N KUALITAS PELAYANA N KEPADA MASYARA KAT	-		24.055 .800,00	DPMPD
3,	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**	**-**			**-**	**52.686.800,00**						**-**	**52.686 .800,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	52.686.800,00			-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP2 : PEM BANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN	-	-	52.686 .800,00	DPMPD
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				22 Dokumen	28.846.200,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP2 : PEM BANGUNA N EKONOMI KERAKYAT AN	-		28.846 .200,00	DPMPD
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	23.840.600,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP2 : PEM BANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN	-		23.840.600,00	DPMPD
4,	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**5.460.518.200,00**						**-**	**6.592.028.900,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	-			343 Desa	5.460.518.200,00			-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP8 : REF ORMASI BI ROKRASI DALAM PE NINGKATA N KUALITAS PELAYANA N KEPADA MASYARA KAT	Desa	-	6.592.028.900,00	DPMPD
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														

			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			343 Dokumen	268.824.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP8 : REFORMASI BIROKRASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	Desa		268.824.000,00	DPMPD
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			26 Dokumen	36.992.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP8 : REFORMASI BIROKRASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	Desa		36.992.000,00	DPMPD
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				343 Dokumen	46.000.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP8 : REF ORMASI BI ROKRASI DALAM PE NINGKATA N KUALITAS PELAYANA N KEPADA MASYARA KAT	Desa		46.000.000,00	DPMPD
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				343 Dokumen	4.374.929.400,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PP8 : REF ORMASI BI ROKRASI DALAM PE NINGKATA N KUALITAS PELAYANA N KEPADA MASYARA KAT	Desa		4.915.313.400,00	DPMPD
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				343 Orang	87.800.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP8 : REF ORMASI BI ROKRASI DALAM PE NINGKATA N KUALITAS PELAYANA N KEPADA MASYARA KAT	Desa		87.800.000,00	DPMPD

	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				26 Laporan	12.922.600,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemeri ntahan Desa PP2 : PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN	Desa		12.922.600,00	DPMPD
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				1 Dokumen	16.215.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemeri ntahan Desa PP7 : PENINGKATAN KONDUSIVITAS, STABILITAS DAN KEAMANAN DAERAH	Desa		16.215.000,00	DPMPD
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	182.214.800,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Desa		300.000.000,00	DPMPD
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	24.533.600,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PP8 : REFORMASI BIROKRASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	Desa		429.824.100,00	DPMPD

	2.13.04.2.01.00 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	18.334.600,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PP7 : PENI NGKATAN KONDUSIV ITAS, STAB ILITAS DAN KEAM ANAN DAERAH	Desa		18.334 .600,00	DPMPD
	2.13.04.2.01.00 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa													
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				343 Dokumen	52.068.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP8 : REF ORMASI BI ROKRASI DALAM PE NINGKATA N KUALITAS PELAYANA N KEPADA MASYARA KAT	Desa		52.068 .000,00	DPMPD
	2.13.04.2.01.00 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	39.479.800,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PP8 : REF ORMASI BI ROKRASI DALAM PE NINGKATA N KUALITAS PELAYANA N KEPADA MASYARA KAT	Desa		39.479.800,00	DPMPD

	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD													
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				2000 Orang	51.949.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PP8 : REF ORMASI BI ROKRASI DALAM PE NINGKATA N KUALITAS PELAYANA N KEPADA MASYARA KAT	Desa		120.000.000,00	DPMPD
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				26 Desa	140.771.400,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP7 : PENI NGKATAN KONDUSIV ITAS, STAB ILITAS DAN KEAM ANAN DAERAH	Desa		140.771.400,00	DPMPD
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	107.484.000,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP8 : REF ORMASI BI ROKRASI DALAM PE NINGKATA N KUALITAS PELAYANA N KEPADA MASYARA KAT	Desa		107.484.000,00	DPMPD

5,	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang dibina***	**-**			**100 %**	**1.087.979.500,00**						**-**	**1.487.860.700,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi*	-			343 desa	1.087.979.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kader dan Lembaga	-	1.487.860.700,00	DPMPD
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	195.689.200,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kader dan Lembaga		248.278.000,00	DPMPD
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	163.990.800,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kader dan Lembaga		250.000.000,00	DPMPD

	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	178.170.800,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa PP2 : PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN	Kader dan Lembaga		178.170.800,00	DPMPD
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	31.326.400,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kader dan Lembaga		80.351.600,00	DPMPD
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	31.331.100,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kader dan Lembaga		31.331.100,00	DPMPD

	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	487.471.200,00	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemeri ntahan Desa PP1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kader dan Lembaga		699.729.200,00	DPMPD
	J U M L A H							**11.785.516.570,00**						**17.456.334.687,00**	

BAB V

PENUTUP

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan secara bertahap, sehingga pada dasarnya pembangunan dari suatu tahap merupakan kelanjutan peningkatan dan penyempurnaan dari pembangunan tahap selanjutnya.

Dalam upaya mendorong keberhasilan pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri maka pembangunan desa lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dibiayai dari APBD II, APBD I maupun APBN, didukung juga dari dana swadaya masyarakat dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pada khususnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diharapkan dapat berjalan denan lancer, efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025, maka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja PD Tahun 2025 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat dengan demikian akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya RKPD 2025 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.

Kediri, - - 2024

KEPALA DPMPD
KABUPATEN KEDIRI

AGUS CAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 197009130 199201 1 001

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jalan P. Sudirman Nomor 141 Telepon 684319, 687211 Kode Pos 64126
Website : www.kedirikab.go.id – Email : dpmpd@kedirikab.go.id
KEDIRI

Kediri, 8 Januari 2024

Kepada
Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kediri
di -
KEDIRI

Nomor : 065/ 131 /418.24/2022
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2023

Menindaklanjuti Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri tanggal 4 Januari 2024 Nomor PC_27/418.54/I2024 perihal Permintaan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2023, bersama ini disampaikan data dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

AGUS CAHYONO, S.Sos.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700913 199201 1 001

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023

DPMPD KABUPATEN KEDIRI

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
														I			II			III			IV														
1	2				3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																																						
Non Urusan																																						
2	13	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	[INDIKATOR DISESUAIKAN]			225.894.426.771			73.936.106.050			13.946.985.871			2.883.161.930			2.883.529.269			5.377.297.889			4.123.504.955	0		14.846.737.843	106,45	1,06	0,00	88.782.843.893	39,30	0,3930	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.01		*Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah			59.169.000			10.504.000			9.685.000			1.234.900			0			0			0	0		1.234.900	12,75	0,13	0,00	11.738.900	19,84	0,1984	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	31.375.000	4	dokumen	5.730.000	2	dokumen	5.030.000	1	dokumen	735.900	1	dokumen	0	1,00	dokumen	0	1	dokumen	0	4	dokumen	735.900	14,63	0,15	8,00	6.465.900	20,61	0,2061	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian (Monev Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian kinerja	30	dokumen	27.794.000	10	dokumen	4.774.000	5	dokumen	4.695.000	1	dokumen	499.000	1	dokumen	0	1,00	dokumen	0	1	dokumen	0	4	dokumen	499.000	10,72	0,11	14,00	5.273.000	18,97	0,1897	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Jumlah laporan	72	laporan	35.891.685.786	24	laporan	10.118.693.996	12	laporan	5.579.732.700		laporan	973.661.738		laporan	1.508.129.048	2	laporan	1.010.028.653	0	laporan	1.084.646.191	2	laporan	4.576.465.632	82,02	0,82	26,17	14.695.159.628	40,94	0,4094	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran	72	laporan	29.147.773.936	24	laporan	8.451.884.973	12	laporan	4.821.802.700	3	laporan	841.138.688	3	laporan	1.392.584.688	3	laporan	830.800.233	3	laporan	932.140.453	12	laporan	3.996.664.062	82,89	0,83	36,00	12.448.549.035	42,71	0,4271	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai yang difasilitasi	298	orang	3.780.831.350	92	orang	1.118.154.523	46	orang	431.323.000	7	orang	90.271.550	10	orang	87.289.460	10,00	orang	123.478.420	12	orang	110.775.740	39	orang	411.815.170	95,48	0,95	131,00	1.529.969.693	40,47	0,4047	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	72	laporan	2.866.334.500	24	laporan	526.874.500	12	laporan	315.360.000	3	laporan	41.430.000	3	laporan	27.620.000	3	laporan	55.240.000	3	laporan	41.730.000	12	laporan	166.020.000	52,64	0,53	36,00	692.894.500	24,17	0,2417	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	6	laporan	24.600.000	2	laporan	8.120.000	1	laporan	4.120.000	1	laporan	821.500		laporan	0		laporan	0	0	laporan	-	1	laporan	821.500	19,94	0,20	3,00	8.941.500	36,35	0,3635	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.02	7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan /semesteran skpd	Jumlah laporan keuangan	72	laporan	47.796.000	24	laporan	9.660.000	12	laporan	5.035.000	3	laporan	0	3	laporan	236.900	3	laporan	510.000	3	laporan	-	12	laporan	746.900	14,83	0,15	36,00	10.406.900	21,77	0,2177	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.02	8	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis	6	laporan	24.350.000	2	laporan	4.000.000	1	laporan	2.002.000		laporan	0	1	laporan	398.000		laporan	0		laporan	-	1	laporan	398.000	19,88	0,20	3,00	4.398.000	18,06	0,1806	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.03		*Administrasi barang milik daerah pada SKPD*	Jumlah Pengadaan Barang	paket	paket	107.360.000		paket	21.537.000	1	paket	13.441.000		paket	0		paket	238.700		paket	3.000.000		paket	1.500.000	0	paket	4.738.700	35,26	0,35	0,00	26.275.700	24,47	0,2447	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.03	6	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengurus barang yang difasilitasi	12	oang	107.360.000	4	oang	21.537.000	2	orang	13.441.000		orang	0		orang	238.700		orang	3.000.000	1	orang	1.500.000	1	orang	4.738.700	35,26	0,35	5,00	26.275.700	24,47	0,2447	DPMPD KAB KEDIRI	
	13	1	2.06		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Jumlah Administrasi Umum	6	paket	454.091.700		paket	423.904.410	1	paket	290.994.510		paket	73.126.953		paket	41.635.100		paket	54.956.598		paket	238.749.815	0	paket	408.468.466	140,37	1,40	0,00	832.372.876	183,31	1,8331	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	6	paket	16.740.700	2	paket	6.164.400	1	paket	2.802.300		paket	0	1	paket	1.684.800		paket	0		paket	-	1	paket	1.684.800	60,12	0,60	3,00	7.849.200	46,89	0,4689	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah penyediaan peralatan	6	paket	163.100.500	2	paket	296.456.250	1	paket	29.824.110		paket	0	0	paket	19.090.000		paket	0	1	paket	161.985.000	1	paket	181.075.000	607,14	6,07	3,00	477.531.250	292,78	2,9278	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan Rumah Tangga	6	paket	40.851.350	2	paket	13.465.610	1	paket	6.832.100		paket	0		paket	1.968.300		paket	1.119.343	1	paket	782.500	1	paket	3.870.143	56,65	0,57	3,00	17.335.753	42,44	0,4244	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.06	5	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang	6	paket	32.871.150	2	paket	14.753.900	1	paket	2.114.000		paket	0	1	paket	1.140.000		paket	0		paket	654.000	1	paket	1.794.000	84,86	0,85	3,00	16.547.900	50,34	0,5034	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.06	6	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	6	paket	35.370.000	2	paket	10.320.000	1	paket	5.640.000		paket	600.000		paket	900.000		paket	600.000	1	paket	1.486.000	1	paket	3.586.000	63,58	0,64	3,00	13.906.000	39,32	0,3932	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	paket	143.510.000	2	paket	36.515.000	1	paket	200.182.000		paket	32.533.353		paket	16.852.000		paket	53.237.255	1	paket	73.842.315	1	paket	176.464.923	88,15	0,88	3,00	212.979.923	148,41	1,4841	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.06	10	Penatausaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pengelola arsip yang	6	orang	21.648.000	2	orang	46.229.250	1	orang	43.600.000		orang	39.993.600		orang	0,00		orang	0		orang	0	0	orang	39.993.600	91,73	0,92	2,00	86.222.850	398,29	3,9829	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	6	paket	320.635.000	2	paket	93.672.146	1	paket	137.774.572		paket	26.385.822		paket	18.723.783		paket	9.830.583		paket	53.794.812	0	paket	182.988.800	132,82	1,33	2,00	276.660.946	86,29	0,8629	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	paket	8.937.500	2	paket	3.500.000	1	paket	1.100.000		paket	1.000.000		paket	0		paket	0		paket	100.000	0	paket	1.100.000	100,00	1,00	2,00	4.600.000	51,47	0,5147	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	6	paket	102.727.500	2	paket	20.081.646	1	paket	14.597.452		paket	2.219.059		paket	1.434.783		paket	2.838.583		paket	2.139.242	0	paket	8.631.667	59,13	0,59	2,00	28.713.313	27,95	0,2795	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.08	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	paket	208.970.000	2	paket	70.090.500	1	paket	35.180.000		paket	8.740.000		paket	12.289.000		paket	6.992.000		paket	51.555.570	0	paket	79.576.570	226,20	2,26	2,00	149.667.070	71,62	0,7162	DPMPD KAB KEDIRI	
2					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa	4	paket			paket		1	paket	86.897.120		paket	14.436.763		paket	0		paket	43.310.280		paket	35.933.520	0	paket	93.680.563	107,81	1,08	0,00	93.680.563	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang	6	paket	403.275.125	2	paket	199.252.769	1	paket	69.696.089		paket	7.290.112		paket	5.132.600		paket	14.820.347		paket	129.667.890	0	paket	156.910.909	225,14	2,25	2,00	356.163.678	88,32	0,8832	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	6	paket	322.610.000	2	paket	142.463.553	1	paket	49.700.000		paket	7.290.112		paket	5.132.600		paket	14.820.347		paket	20.249.850	0	paket	47.492.909	95,56	0,96	2,00	189.956.462	58,88	0,5888	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	1	2.09	9	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	6	paket	80.665.125	2	paket	56.789.216	1	paket	19.996.089		paket	0		paket	0		paket	0		paket	109.418.000	0	paket	109.418.000	547,20	5,47	2,00	166.207.216	206,05	2,0605	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	2			**Program Penataan Desa**	**Persentase desa yang proses**			104.283.460			166.179.900			115.724.000			0			580.000			0			9.919.500	0		10.499.500	9,07	0,09	0,00	176.679.400	169,42	1,6942	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	2	2.01		*Penyelenggaraan Penataan Desa*	Jumlah desa yang difasilitasi			104.283.460			166.179.900			115.724.000			0			580.000			0			9.919.500	0		10.499.500	9,07	0,09	0,00	176.679.400	169,42	1,6942	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	2	2.01	2	Fasilitasi tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Tata	240	desa	104.283.460	40	desa	166.179.900	40	desa	115.724.000	2	desa	0	2	desa	580.000	3,00	desa	0	3	desa	9.919.500	10	desa	10.499.500	9,07	0,09	50,00	176.679.400	169,42	1,6942	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	3			**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase peningkatan**			166.349.700			65.938.780			22.110.000			0			0			1.352.000			19.707.000	0		21.059.000	95,25	0,95	0,00	86.997.780	52,30	0,5230	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	3	2.01		*Fasilitasi kerja sama antar desa*	Jumlah kerjasama desa yang			166.349.700			65.938.780			22.110.000			0			0			1.352.000			19.707.000	0		21.059.000	95,25	0,95	0,00	86.997.780	52,30	0,5230	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan	6	kawasan	166.349.700	0	kawasan	65.938.780	1	kawasan	22.110.000	kawasan		0	kawasan		0	kawasan		1.352.000	kawasan		19.707.000	0	kawasan	21.059.000	95,25	0,95	0,00	86.997.780	52,30	0,5230	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang difasilitasi**			178.368.530.600			59.280.349.800			5.553.417.000			1.017.984.645			1.314.090.038			3.585.673.082			1.562.256.409	0		7.480.004.174	134,69	1,35	0,00	66.760.353.974	37,43	0,3743	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01		*Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa*	Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa			178.368.530.600			59.280.349.800			5.553.417.000			1.017.984.645			1.314.090.038			3.585.673.082			1.562.256.409	0		7.480.004.174	134,69	1,35	0,00	66.760.353.974	37,43	0,3743	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	928.689.200	343	desa	625.690.696	343	desa	111.700.000	desa		10.114.125	desa		65.192.750	desa		10.640.000	343	desa	176.536.494	343	desa	262.483.369	234,99	2,35	686,00	888.174.065	95,64	0,9564	DPMPD KAB KEDIRI	
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	469.330.000	343	desa	172.870.000	343	desa	58.800.000	desa		0	desa		3.850.000	desa		9.570.000	343	desa	25.140.000	343	desa	38.560.000	65,58	0,66	686,00	211.430.000	45,05	0,4505	DPMPD KAB KEDIRI	

2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	367.000.000	343	desa	91.923.000	343	desa	66.490.000		desa	0		desa	42.300.000		desa	0	343	desa	9.720.000	343	desa	52.020.000	78,24	0,78	686,00	143.943.000	39,22	0,3922	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	170.816.884.800	343	desa	55.949.245.928	343	desa	4.250.732.000		desa	989.747.520		desa	1.006.583.888		desa	1.033.024.682	343	desa	1.016.545.608	343	desa	4.045.901.698	95,18	0,95	686,00	59.995.147.626	35,12	0,3512	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	4	2.01	5	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang difasilitasi	4116	orang	498.281.100	1.372	orang	199.562.000	686	orang	78.190.000		orang	0		orang	10.970.000		orang	2.145.320.000	343	orang	112.550.000	343	orang	2.268.840.000	2.901,70	29,02	1.715,00	2.468.402.000	495,38	4,9538	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	4	2.01	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah desa	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	274.280.000	343	desa	31.880.000	343	desa	20.190.000		desa	0		desa	3.220.000		desa	6.560.000	343	desa	2.000.000	343	desa	11.780.000	58,35	0,58	686,00	43.660.000	15,92	0,1592	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	4	2.01	7	Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	219.296.000	343	desa	97.675.000	343	desa	25.835.000		desa	0		desa	0		desa	7.730.000	343	desa	0	343	desa	7.730.000	29,92	0,30	686,00	105.405.000	48,07	0,4807	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	2.111.992.000	343	desa	1.330.286.176	343	desa	185.000.000		desa	2.585.000		desa	7.957.400		desa	60.809.900	343	desa	52.293.600	343	desa	123.645.900	66,84	0,67	686,00	1.453.932.076	68,84	0,6884	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan pemilihan,pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	64.900.000	343	desa	209.515.000	343	desa	175.000.000		desa	0		desa	111.030.000		desa	3.740.000	343	desa	1.900.000	343	desa	116.670.000	66,67	0,67	686,00	326.185.000	502,60	5,0260	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	252.855.000	343	desa	28.525.000	343	desa	29.145.000		desa	6.790.000		desa	5.440.000		desa	8.510.000	343	desa	1.450.000	343	desa	22.190.000	76,14	0,76	686,00	50.715.000	20,06	0,2006	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan profil desa	Jumlah desa yang difasilitasi	344	desa/kel	360.075.000	344	desa/kel	88.740.500	344	desa/kel	66.125.000		desa/kel	0		desa/kel	0		desa/kel	55.333.000	343	desa/kel	6.652.000	343	desa/kel	61.985.000	93,74	0,94	687,00	150.725.500	41,86	0,4186	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	4	2.01	13	fasilitasi pengelolalaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	440.280.000	343	desa	17.570.000	343	desa	62.190.000		desa	0		desa	1.480.000		desa	54.050.000	343	desa	1.000.000	343	desa	56.530.000	90,90	0,91	686,00	74.100.000	16,83	0,1683	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	4	2.01	14	pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah desa yang difasilitasi	6174	orang	805.545.000	2.058	orang	88.350.000	1.029	orang	82.100.000		orang	0		orang	580.000		orang	33.920.000	343	orang	21.018.000	343	orang	55.518.000	67,62	0,68	2.401,00	143.868.000	17,86	0,1786	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	4	2.01	15	fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	549.280.000	343	desa	216.571.000	343	desa	157.450.000		desa	8.748.000		desa	5.120.000		desa	119.225.500	343	desa	69.490.707	343	desa	202.584.207	128,67	1,29	686,00	419.155.207	76,31	0,7631	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	4	2.01	18	fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi	344	desa/kel	209.842.500	344	desa/kel	131.945.500	344	desa/kel	184.470.000		desa/kel	0		desa/kel	50.366.000		desa/kel	37.240.000	343	desa/kel	65.960.000	343	desa/kel	153.566.000	83,25	0,83	687,00	285.511.500	136,06	1,3606	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	5			Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan,lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif			10.019.046.400			3.556.073.249			2.154.411.000			283.467.760			0			697.636.626			1.029.263.376	0		2.004.367.762	93,04	0,93	0,00	5.560.441.011	55,50	0,5550	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	5	2.01		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemerintahan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serat pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota				10.019.046.400			3.556.073.249			2.154.411.000			283.467.760			0			697.636.626			1.029.263.376	0		2.004.367.762	93,04	0,93	0,00	5.560.441.011	55,50	0,5550	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang difasilitasi penataan kelembagaannya	343	desa	1.399.060.000	343	desa	1.084.835.500	40	desa	95.762.000		desa	9.768.000		desa	0		desa	16.238.600	343	desa	161.571.500	343	desa	187.578.100	195,88	1,96	686,00	1.272.413.600	90,95	0,9095	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	2.566.752.000	343	desa	365.838.000	343	desa	394.125.000		desa	33.493.500		desa	0		desa	124.796.500	343	desa	71.238.640	343	desa	229.526.640	58,24	0,58	686,00	595.364.640	23,20	0,2320	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta lomba yang difasilitasi	255	orang	873.822.200	65	orang	372.069.900	30	orang	294.973.000		orang	3.189.000		orang	0	58,00	orang	221.977.520		orang	2.297.600	58	orang	227.464.120	77,11	0,77	123,00	599.534.020	68,61	0,6861	DPMPD KAB KEDIRI
						Gelar TTG Tingkat Nasional	5	kali		1	kali		1	kali			kali			kali		1,00	kali	0		kali		1	kali				2,00	0			DPMPD KAB KEDIRI
						Lomba TTG Tingkat Kabupaten	5	kali		2	kali		1	kali			kali			kali		1,00	kali	0		kali		1	kali				3,00	0			DPMPD KAB KEDIRI
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi	343	desa	853.255.000	343	desa	90.861.560	343	desa	77.075.000		desa	0		desa	0		desa	13.188.125	343	desa	2.126.900	343	desa	15.315.025	19,87	0,20	686,00	106.176.585	12,44	0,1244	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	5	2.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi,Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman.	343	desa	2.449.408.000	343	desa	676.262.650	343	desa	193.000.000		desa	41.901.460		desa	0		desa	57.921.000	343	desa	15.000.000	343	desa	114.822.460	59,49	0,59	686,00	791.085.110	32,30	0,3230	DPMPD KAB KEDIRI
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM,Jumlah desa yang difasilitasi	26	kec	1.876.749.200	26	kec	966.205.639	26	kec	1.099.476.000		kec	195.115.800		kec	0		kec	263.514.881	26	kec	771.030.736	26	kec	1.229.661.417	111,84	1,12	52,00	2.195.867.056	117,00	1,1700	DPMPD KAB KEDIRI
							343	desa	0	343	desa	0	343	desa	0		desa	0		desa	0		desa	0	343	desa	0	343	desa	0			686,00				DPMPD KAB KEDIRI
																																Predikat					
																																Predikat					
									225.894.426.771			137.004.647.779			13.946.985.871			2.383.161.930			2.883.529.269			5.377.297.889			4.123.504.955			14.846.737.843	106,45			88.782.843.893	39,30		
					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																												106,45				
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																																

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Adanya koordinasi yang baik dan komitmen untuk bekerja bersama menyelesaikan semua target yang akan di capai

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Pelaksanaan pencatatan pertanggungjawaban keuangan membutuhkan waktu dan perlu kelengkapan dokumen

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengisi permasalahan dan tindak lanjut secara benar

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Perubahan RKPD TA. 2024 diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target RPJMD 2021-2026

Kediri, 8 Januari 2024

KEPALA DPMPD KAB KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

AGUS CAHYONO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700913 199201 1 001

Tabel : 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DPMPD Kabupaten Kediri

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Jumlah BUMDes yang aktif**			266	280	295	310	325	343	262	286	252	
2	**Jumlah Desa Mandiri**			4	8	12	16	20	24	7	31	50	
3	**Jumlah Desa Maju**			20	40	60	80	100	120	125	187	240	
4	**Prosentase lembaga desa aktif**			78.00%	81.00%	84.00%	87.00%	90.00%	93.00%		84.00%	83.00%	
5	**Prosentase laporan keuangan tepat waktu**			80.00%	83.00%	86.00%	89.00%	92.00%	95.00%		83.00%	86.00%	

		Catatan analisis
Tahun 2025	**Tahun 2026**	
15	16	17

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN KEDIRI

SKPD DPMPD KABUPATEN KEDIRI

NO.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Bantuan untuk Balai Dusun	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
2	Bantuan untuk Balai Dusun	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
3	BKK Desa Tertek	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
4	Bantuan Keuangan Desa di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo untuk Rabat beton	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
5	Bantuan Keuangan Desa di Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo untuk rabat beton	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
6	Bantuan Keuangan Desa di Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo untuk TPT	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
7	Bantuan Keuangan Desa di Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo, untuk Aspal Jalan	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
8	Bantuan Keuangan Desa di Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo, untuk rabat beton jalan perbatasan	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
9	Bantuan Keuangan Desa di Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo untuk rabat beton jalan perbatasan	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
10	PEMBANGUNAN TPT	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
11	BKK Desa Grogol	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
12	BKK Desa	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
13	RABAT JALAN PERSAWAHAN	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
14	BKK INFRASTRUKTUR DESA @Rp. 200.000.000	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
15	BKK INFRASTRUKTUR DESA	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
16	BKK INFRASTRUKTUR DESA	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
17	BKK INFRASTRUKTUR DESA	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
18	BKK INFRASTRUKTUR DESA	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
19	BKK INFRASTRUKTUR DESA	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
20	BKK INFRASTRUKTUR DESA	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
21	bantuan keuangan kusus hotmix/peningkatan jalan desa susuhbango kecamatan ringinrejo kabupaten kediri	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
22	Terbatasnya ADD untuk pengembangan desa di PEMERINTAH DESA PURWODADI	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
23	Terbatasnya ADD untuk pengembangan desa di PEMERINTAH DESA KEMPLENG	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
24	Terbatasnya ADD untuk pengembangan desa di PEMERINTAH DESA PARON	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
25	BKK INFRASTRUKTUR DESA	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
26	BANTUAN KEUANGAN DESA	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
27	BANTUAN KEUANGAN DESA	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
28	Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa Susuhbango - Pekerjaan Hotmix	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun

29	Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa Gayam - Wisata Alam	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
30	Rabat Beton Jalan Menuju Makam	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
31	Rehab Kantor Desa Tawang Pembangunan Tempat Parkir dan Paving Halaman Kantor Desa	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
32	Drainase Dusun Karangrejan	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
33	Rehab Lapangan Sepakbola Desa Tempurejo Kecamatan Wates	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
34	BKK INFRASTRUKTUR @ Rp. 150.000.000	Kabupaten Kediri	Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun
	JUMLAH TOTAL		

Besaran / Volume	Catatan
5	6
60,000,000	
60,000,000	
100,000,000	
100,000,000	
100,000,000	
100,000,000	
100,000,000	
200,000,000	
200,000,000	
75,000,000	
50,000,000	
500,000,000	
100,000,000	
1,600,000,000	
200,000,000	
200,000,000	
200,000,000	
200,000,000	
100,000,000	
350,000,000	
100,000,000	
150,000,000	
100,000,000	
100,000,000	
200,000,000	
25,000,000	
25,000,000	
200,000,000	

150,000,000	
200,000,000	
110,000,000	
115,000,000	
125,000,000	
300,000,000	
6,495,000,000	